

Demokrasi dalam Mewujudkan Ekonomi dan Pembangunan Nasional Berdasarkan Pancasila

Oleh: Yakob KM Ismail (Maheswara Utama PIP)



Pancasila sebagai Dasar Negara dan Paradigma Pembangunan Nasional

Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi juga paradigma yang membimbing arah pembangunan nasional Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Pancasila: Landasan Ideologi dan Falsafah Bangsa

Pancasila berperan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang menyatukan berbagai aspek kehidupan berbangsa.

Sebagai paradigma pembangunan, Pancasila mengintegrasikan dimensi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan dalam satu kesatuan yang utuh.

Fokus utamanya adalah mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang merata dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.



Nilai-Nilai Pancasila dalam Pembangunan Nasional

1

Ketuhanan Yang Maha Esa

Menjadi landasan spiritual dan moral dalam pembangunan, menjamin kerukunan antar umat beragama dan menolak praktik ekonomi yang bertentangan dengan nilai-nilai agama.

2

Kemanusiaan yang Adil dan dan Beradab

Memastikan penghapusan segala bentuk penindasan dan ketidakadilan dalam sistem ekonomi, menjunjung tinggi HAM dalam kegiatan pembangunan. 3

Persatuan Indonesia

Memperkokoh persatuan dalam kebhinnekaan, memastikan pembangunan yang merata di seluruh wilayah tanah air tanpa diskriminasi.

4

Kerakyatan

Menerapkan Demokrasi Pancasila sebagai sistem politik yang menjamin partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan pembangunan. 5

Keadilan Sosial

Memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, distribusi kesejahteraan yang merata, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan.



Demokrasi Ekonomi Berbasis Pancasila

Demokrasi Ekonomi: Konsep dan Landasan Hukum

Pasal 33 UUD 1945

Menjadi fondasi konstitusional bagi demokrasi ekonomi Indonesia, menekankan pemanfaatan sumber daya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ekonomi Rakyat

Menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan nasional, bukan sebagai objek tetapi subjek pembangunan.

Jalan Tengah Ideologi

Menolak dominasi kapitalisme dan sosialisme yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila yang menjunjung tinggi keadilan dan kemanusiaan.



Sistem Ekonomi Pancasila: Harmoni antara Modal dan Koperasi

Asas Kekeluargaan

Ekonomi campuran yang mengedepankan asas kekeluargaan, gotong-royong, dan kepedulian sosial sebagai nilai inti.

Partisipasi Masyarakat

Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses ekonomi melalui berbagai bentuk usaha kolektif dan kegiatan produktif.

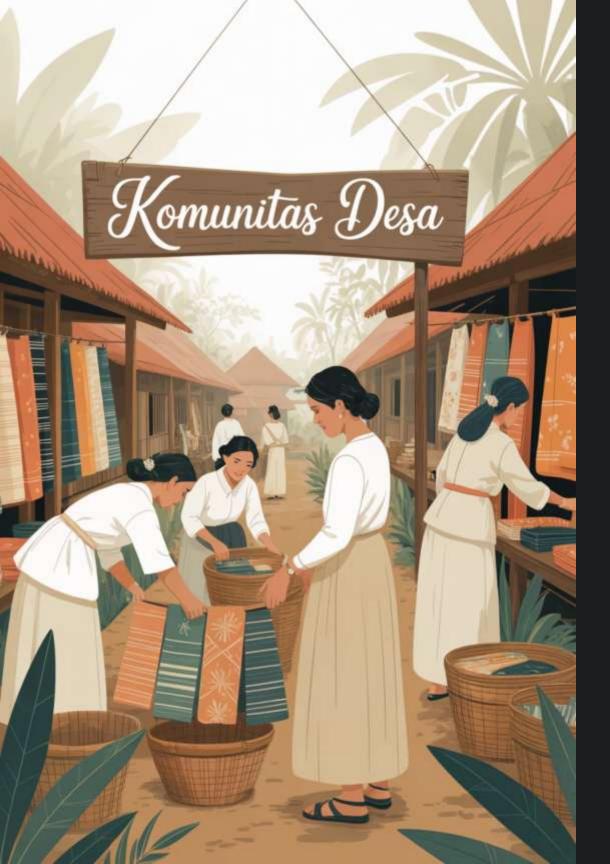


Peran Koperasi

Koperasi menjadi soko guru perekonomian nasional yang memperkuat basis ekonomi kerakyatan dan distribusi kesejahteraan.

Regulasi Negara

Negara berperan sebagai pengatur dan pengawas pengelolaan sumber daya alam untuk menjamin keadilan sosial bagi seluruh rakyat.



Demokrasi dalam Praktik Ekonomi Pancasila

Gotong-Royong dan Kesejahteraan Bersama



Distribusi Akses Ekonomi

Prinsip gotong-royong memastikan akses ekonomi yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Sinergi UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi basis produksi dan distribusi yang menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi lokal.

Contoh Nyata

Koperasi petani di Jawa Tengah yang berhasil memotong rantai distribusi panjang dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya.

Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Demokrasi Ekonomi







Intervensi Pemerintah

Kebijakan yang berpihak pada pemberantasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan ekonomi antar daerah.

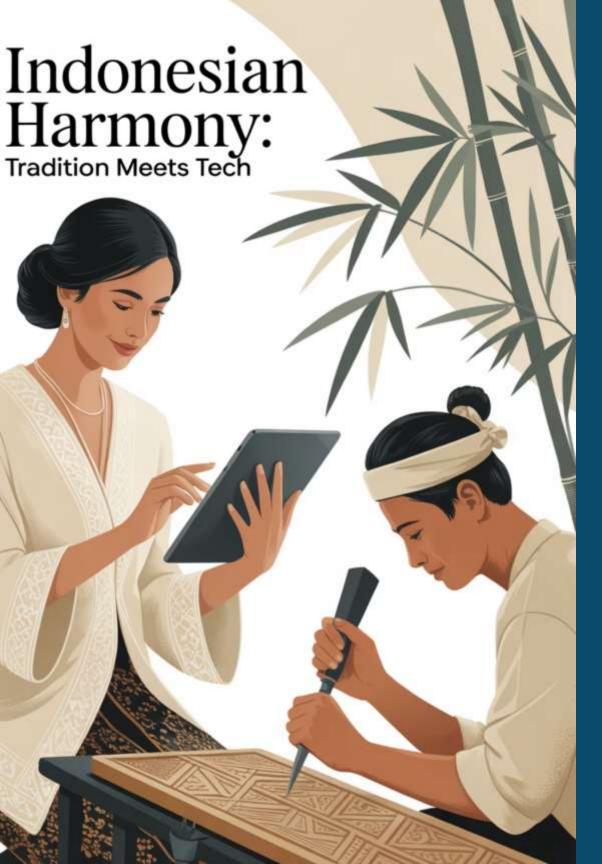
Partisipasi Masyarakat

Keterlibatan aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan ekonomi nasional.

Kolaborasi Ekotekno-Ekotekno-Antropologi

Antropologi Memadukan teknologi dengan kearifan dan budaya lokal untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkelanjutan.

Pendekatan terpadu ini memungkinkan terjadinya pembangunan ekonomi yang inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.



Tantangan dan Peluang Demokrasi Ekonomi Pancasila

Dampak Globalisasi dan Digitalisasi



Otomasi & Peralihan Tenaga Kerja

Teknologi menggeser tenaga kerja tradisional ke digital dan otomatis, memerlukan adaptasi keterampilan baru.



Perdagangan Online

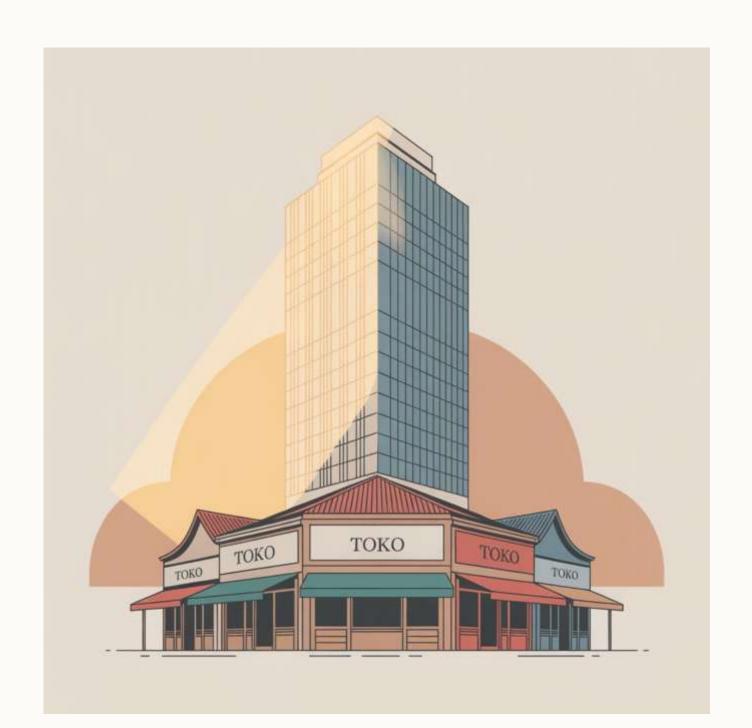
E-commerce mengubah pola konsumsi dan distribusi, membuka peluang sekaligus tantangan bagi pelaku ekonomi lokal.



Hoaks & Disinformasi

Penyebaran informasi tidak benar mengganggu stabilitas sosial-ekonomi dan kepercayaan publik.

Ketimpangan dan Dominasi Modal Asing



Dominasi Modal Asing

Masih kuatnya penguasaan sektor-sektor strategis oleh perusahaan multinasional, menyulitkan pertumbuhan modal nasional.

Kedaulatan Ekonomi

Tantangan dalam mewujudkan ekonomi rakyat yang berdaulat sesuai cita-cita Pancasila di tengah arus globalisasi.

Penguatan Ekonomi Lokal

Upaya untuk memperkuat kepemilikan nasional dan memberdayakan ekonomi lokal melalui kebijakan yang berpihak pada UMKM dan koperasi.

Studi Kasus dan Implementasi Nyata





Revitalisasi Semangat Pancasila dalam Ekonomi

Sarasehan Revitalisasi Trisakti (2023)

Kemenko PMK
menyelenggarakan kegiatan yang
membahas kembali konsep
Trisakti Soekarno dengan fokus
pada kemandirian ekonomi dan
politik serta kebudayaan
nasional.

Ekonomi Berdikari

Penekanan pada pembangunan ekonomi yang mandiri dan tidak bergantung pada dominasi asing, memperkuat basis produksi dalam negeri.

Tokoh Penggerak

Prof. Nunung Nuryartono, Dr. Arif Budimanta, dan Ir. Tri Mumpuni memberikan kontribusi pemikiran dan implementasi ekonomi Pancasila di berbagai sektor.

Konsep Ekotekno-Antropologi oleh Tri Mumpuni



Kolaborasi Teknologi dan Budaya

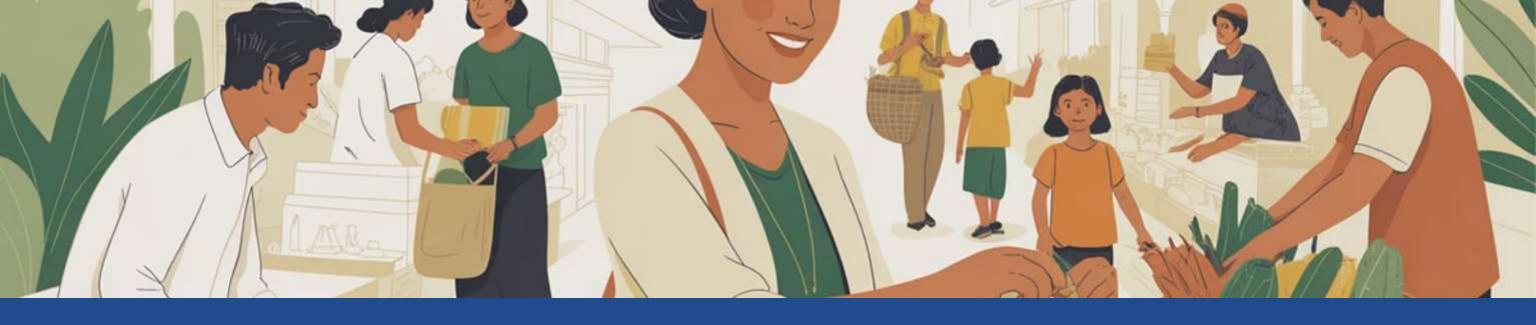
Memadukan teknologi modern dengan kearifan lokal dan tradisi masyarakat untuk menciptakan solusi ekonomi yang berkelanjutan.

Transformasi Konsumen menjadi Produsen

Mendorong masyarakat lokal untuk tidak hanya menjadi konsumen tetapi juga produsen yang menghasilkan nilai tambah ekonomi.

Daya Saing Produk Lokal

Meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal agar mampu bersaing di pasar nasional dan global tanpa kehilangan identitas budaya.



Demokrasi dan Pembangunan Berkeadilan

Keadilan Sosial sebagai Tujuan Utama



Keseimbangan

Menjaga keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan.



Pemerataan

Memastikan distribusi hasil pembangunan yang adil dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.



Keberlanjutan

Membangun sistem ekonomi yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek lingkungan.



Kesejahteraan Kolektif

Mewujudkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh, bukan hanya kesejahteraan individu atau kelompok tertentu.

Demokrasi Politik dan Ekonomi yang Terintegrasi

Partisipasi Rakyat

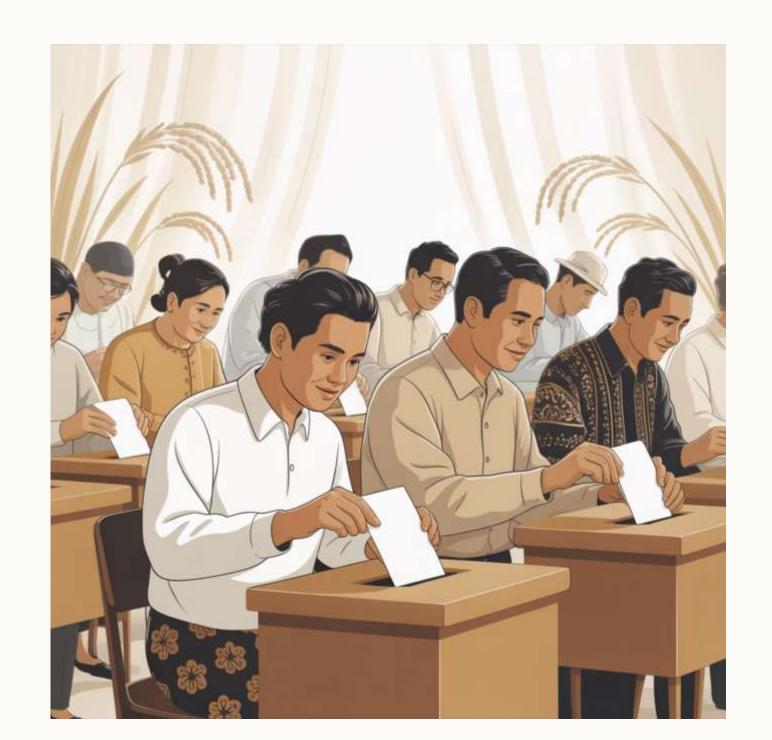
Memastikan keterlibatan aktif rakyat dalam proses pengambilan keputusan politik dan ekonomi yang menyangkut kepentingan publik.

Stabilitas Politik

Menciptakan stabilitas politik sebagai prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menarik investasi.

Harmoni Nasional

Demokrasi Pancasila menjadi alat untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan berbagai kepentingan dalam masyarakat.





Visi Indonesia Emas 2045 dan Peran Demokrasi Ekonomi



Menuju Indonesia Emas 2045



Pembangunan Berkelanjutan

Membangun ekonomi berbasis nilai Pancasila yang memperhatikan aspek lingkungan dan keberlangsungan generasi mendatang.



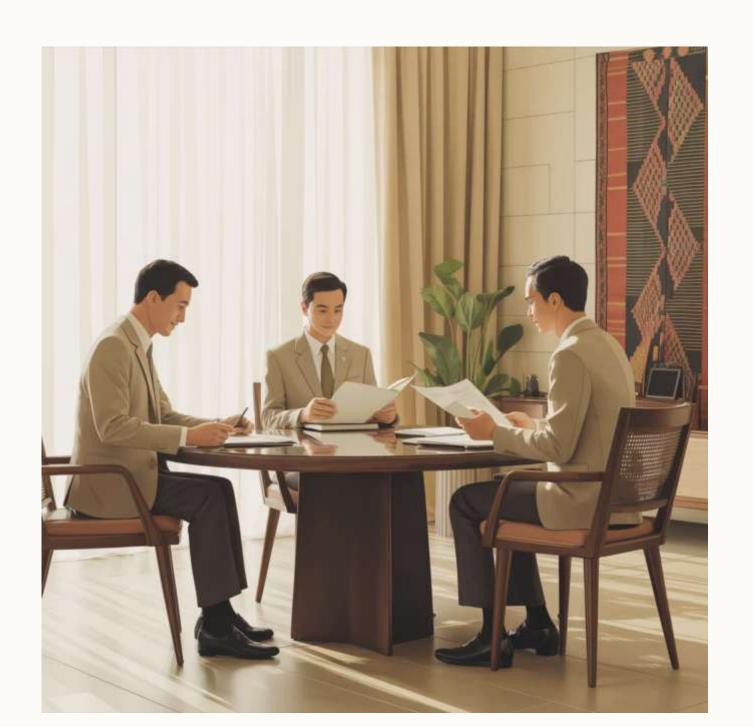
Pemerataan Kesejahteraan

Mengurangi kesenjangan ekonomi dengan penguatan ekonomi kerakyatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.



Sinergi Multi-Pihak

Membangun kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan nasional yang terintegrasi.



Strategi Akselerasi Pembangunan Nasional

Kebijakan Intervensi

Penerapan kebijakan yang langsung menyasar persoalan sosial-ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan wilayah.

Penguatan Ekonomi Rakyat

Memperkuat peran UMKM dan koperasi sebagai tulang punggung ekonomi nasional melalui akses permodalan dan pelatihan.

Teknologi Tepat Guna

Memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan dan budaya lokal untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.

Kesimpulan dan Aksi Nyata





Demokrasi Berbasis Pancasila: Pilar Ekonomi dan Pembangunan Nasional

1 — Keadilan Sosial

Demokrasi ekonomi Pancasila menjamin keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan melalui pengelolaan sumber daya yang bertanggung jawab.

Paradigma Pemersatu

Pancasila menjadi paradigma pembangunan yang menyatukan seluruh elemen bangsa dalam upaya mewujudkan kemakmuran bersama.

Partisipasi Aktif

Peran aktif seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah sangat krusial dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Pancasila.



Mari Wujudkan Ekonomi dan Pembangunan Nasional Berbasis Demokrasi Pancasila!

1 Tingkatkan Partisipasi 2

Berperan aktif dalam kegiatan ekonomi produktif dan penguatan nilai gotongroyong dalam pembangunan nasional.

Perkuat Ekonomi Kerakyatan

Dukung produk dan usaha lokal, bergabung dengan koperasi, dan berkontribusi dalam penguatan kedaulatan ekonomi nasional.

Capai Indonesia yang Bermartabat

Bersama kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat berdasarkan nilai-nilai Pancasila menuju Indonesia Emas 2045.